



Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

RENJA

RENCANA KERJA



2026

Gedung Graha Krida, Jl. Aloon-Aloon Utara No.9 7th Floor,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413
Telepon : 0352-3514086



2026

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA (RENCANA KERJA)

perdagkum.ponorogo.go.id

perdagkum.png

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2026 diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Sehingga pada akhirnya nanti akan tercapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana visi Kabupaten Ponorogo yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, Agustus 2025

Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197512091996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	80
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	81
3.3 Program dan Kegiatan.....	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	101
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Label T-C.29.....	41
Tabel 2. Label T-C.30.....	43
Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.....	44
Tabel 4. Label T-C.31.....	70
Tabel 5. Label T-C.32.....	79
Tabel 6. Label T-C.33.....	100
Tabel 7. Usulan Program/Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya Pemerintah Daerah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Ponorogo Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dalam rangka Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2026 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2026.

Renja SKPD berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2026 mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Ponorogo, didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Perubahan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2018.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing SKPD dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional (RAN).
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2026 menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA LITBANG dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2026 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Ponorogo berdasarkan evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Disusunya Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang di dalam Renstra dan telah diperjanjikan di perjanjian kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya, serta proyeksi tahun yang akan datang, secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel T-C.29.

Format A

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO											
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%	889.122.340	404.200.000	386.352.400	96%	27,50%	410.170.000	410.170.000	102.542.500
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80%	889.122.340	404.200.000	386.352.400	96%	80%	410.170.000	410.170.000	102.542.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	889.122.340	404.200.000	386.352.400	96%	250 orang	410.170.000	1.685.644.740	421.411.185
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	0	0	0	0%	2,50 %	145.000.000	145.000.000	36.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	0	0	0	0%	2,5%	145.000.000	145.000.000	36.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0	0	0	0%	100 unit usaha	125.000.000	125.000.000	31.250.000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,50%	30.025.000	5.000.000	4.870.300	97%	13,8 %	141.260.000	176.155.300	44.038.825
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	8.650.000	5.000.000	4.870.300	97%	13,8 %	127.400.000	140.920.300	35.230.075

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	8.650.000	5.000.000	4.870.300	97%	12 dokumen	127.400.000	140.920.300	35.230.075

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	10.075.000	0	0	0%	13,80 %	7.460.000	17.535.000	4.383.750
3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	10.075.000	0	0	0%	12 dokumen	7.460.000	17.535.000	4.383.750
3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	11.300.000	0	0	0%	13,80 %	6.400.000	17.700.000	4.425.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	11.300.000	0	0	0%	12 dokumen	6.400.000	17.700.000	4.425.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	299.309.520	207.427.900	192.879.050	93%	100%	3.143.457.153	3.635.645.723	908.911.431
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	285.849.520	0	0	0%	60%	2.679.228.438	2.965.077.958	741.269.490
3.30.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	285.849.520	0	0	0%	28 unit	2.679.228.438	2.965.077.958	741.269.490

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	-	13.460.000	207.427.900	192.879.050	93%	60%	464.228.715	670.567.765	167.641.941
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	13.460.000	207.427.900	192.879.050	93%	12 dokumen	464.228.715	670.567.765	167.641.941
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Prosentase stabilisasi harga barang	0,22%	0	47.240.000	45.825.862	97%	100%	57.600.000	103.425.862	25.856.466

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	kebutuhan pokok dan penting									
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22%	0	47.240.000	45.825.862	97%	18 monitoring	57.600.000	103.425.862	25.856.466

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	0	47.240.000	45.825.862	97%	12 laporan	57.600.000	103.425.862	25.856.466

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0	0	0%	12 laporan	0	0	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	81.250.051	205.000.000	202.496.655	99%	0,1%	50.000.000	333.746.706	83.436.677
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	81.250.051	205.000.000	202.496.655	99%	100,0%	50.000.000	333.746.706	83.436.677

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	81.250.051	205.000.000	202.496.655	99%	1000 0 unit	50.000.000	333.746.706	83.436.677
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100%	0	0	0	0%	16,9 %	357.856.400	357.856.400	89.464.100
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50%	0	0	0	0%	16,9 %	357.856.400	357.856.400	89.464.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.07.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	0	0	0	0%	100 UMKM	357.856.400	357.856.400	89.464.100
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	568.629.000	1.180.000.000	900.431.254	76%	0,25 %	513.400.000	1.982.460.254	495.615.064

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	568.629.000	590.000.000	450.215.627	76%	5 laporan	513.400.000	1.532.244.627	383.061.157
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0%	6 dokumen	100.000.000	100.000.000	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0%	6 dokumen	20.000.000	20.000.000	5.000.000
3.31.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	568.629.000	570.000.000	435.245.627	76%	5 dokumen	0	1.003.874.627	250.968.657

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0	0	0	0%	6 dokumen	390.108.100	390.108.100	97.527.025
3.31.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	0	20.000.000	14.970.000	75%	6 dokumen	513.400.000	528.370.000	132.092.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional	0,25%	0,00	15.000.000,00	11.653.000,00	78%	0,25%	0,00	11.653.000	2.913.250
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyampaian Data Industri	15 IKM	0,00	15.000.000,00	11.653.000,00	78%	15 IKM	0,00	11.653.000	2.913.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	11.653.000,00	77,69%	1 Dokumen	0,00	11.653.000	2.913.250
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)										
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	24.877.926.831	9.887.417.314	8.815.882.431	89%	100%	0	33.693.809.262	8.423.452.316

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	5.225.500	20.064.000	19.871.000	99%	100%	126.608.421	151.704.921	37.926.230
2.17.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.374.000	10.032.000	9.935.500	99%	6 dokumen	64.836.116	83.145.616	20.786.404

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.225.500	10.032.000	9.935.500	99%	18 dokumen	61.772.305	76.933.305	19.233.326
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	21.523.860.497	9.079.624.309	8.454.192.972	93%	100%	8.270.602.107	38.248.655.576	9.562.163.894

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	19.208.144.625	8.097.264.422	7.507.440.785	93%	95 orang/bulan	7.090.324.000	33.805.909.410	8.451.477.353
2.17.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2.307.266.672	968.759.887	934.384.587	96%	36 dokumen	1.147.560.957	4.389.212.216	1.097.303.054
2.17.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.206.000	6.100.000	5.745.300	94%	6 laporan	22.021.850	31.973.150	7.993.288

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.243.200	7.500.000	6.622.300	88%	4 laporan	10.695.300	21.560.800	5.390.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	80%	0	192.950.00 0	192.450.00 0	100%	100%	670.860.00 0	863.310.000	215.827.500
2.17.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0	192.950.00 0	192.450.00 0	100%	15 orang	560.460.00 0	752.910.000	188.227.500
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan	100%	1.106.731.138	525.064.15 5	510.531.23 6	97%	100%	1.117.132.620	2.734.394.994	683.598.749

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		prasarana perangkat daerah yang memadai									
2.17.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0	5.000.000	4.974.000	99%	50 paket	10.127.400	15.101.400	3.775.350
2.17.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	103.752.000	35.000.000	34.834.000	100%	7 paket	190.300.000	328.886.000	82.221.500
2.17.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	259.961.000	172.367.400	162.681.500	94%	100 paket	195.939.000	618.581.500	154.645.375

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	412.103.550	154.506.197	152.310.000	99%	12 paket	159.912.320	724.325.870	181.081.468
2.17.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	92.512.000	34.000.000	31.620.000	93%	12 dokumen	45.540.000	169.672.000	42.418.000
2.17.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	238.402.588	124.190.558	124.111.736	100%	12 laporan	283.318.916	645.833.240	161.458.310

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.348.921.765	445.086.963	423.093.231	95%	100%	1.522.219.952	3.294.234.948	823.558.737
2.17.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.176.765.625	365.086.963	356.382.331	98%	36 laporan	1.058.914.880	2.592.062.836	648.015.709
2.17.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.765.000	10.000.000	9.780.000	98%	12 laporan	40.916.500	65.461.500	16.365.375

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.094.640	10.000.000	8.783.600	88%	12 laporan	331.412.972	383.291.212	95.822.803
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	80%	223.949.863	149.692.042	149.368.459	100%	100%	163.213.980	536.532.302	134.133.076

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	Rp	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	223.949.863	149.692.042	149.368.459	100%	6 unit	163.213.980	536.532.302	134.133.076

Tabel 1. Label T-C.29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, adapun hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel T-C.30.

Tujuan 1 : Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai perdagangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo

Format B

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Ponorogo**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase koperasi aktif			-	100%	100%		85%	85%	100%	100%	
2	Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya			80%	82%	85%	85%	80%	80%	82%	85%	
3	Prosentase peningkatan Volume Usaha Koperasi			27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	
4	Prosentase Peningkatan Omset Usaha mikro			80%	82%	85%	85%	80%	80%	82%	85%	
5	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah			10%	20%	20%	20%	10%	10%	20%	20%	
6	Prosentase peningkatan nilai perdagangan			2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	
7	Prosentase pertumbuhan IKM			0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	

Tabel 2. Label T-C.30

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024, total alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.163.287.021,- (*Empat milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah*). Realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 14.624.197.662,- (*Empat belas milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) atau terealisasi sebesar 96,33% dan alokasi belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 7.323.870.000,- (*Tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 6.973.048.542,- (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) atau terealisasi sebesar 95,21%.

Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi	Realisasi	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.323.870.000	6.973.048.542	95,21%
II	BELANJA LANGSUNG	4.163.287.021	4.133.095.078	99,27%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.487.157.021	11.106.143.620	96,68%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.165.282	59.091.500	99,88%
i.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.800	29.991.000	99,97%
ii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.165.482	29.100.500	99,78%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.491.879.675	8.134.625.317	95,79%

i.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.323.870.000	6.937.048.052	95,21%
ii.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.143.120.175	1.136.724.775	99,44%
iii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.800	14.991.500	99,94%
iv.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.889.700	9.860.500	99,70%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.162.760.000	1.162.160.000	99,95%
i.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.162.760.000	1.162.160.000	99,95%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.338.715	504.467.634	98,46%
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.565.500	7.556.000	99,87%
ii.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.244.350	200.138.600	99,45%
iii.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	166.177.740	161.859.700	97,40%
iv.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan	26.710.000	25.358.000	94,94%
v.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.641.125	109.555.334	99,02%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.856.600	152.203.288	98,29%
i.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.856.600	152.203.288	98,29%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.156.749	1.093.595.881	98,86%
i.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.996.900	11.950.000	99,61%
ii.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.027.493.183	1.051.415.181	98,82%
iii.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.616.966	46.459.000	99,66%

iv.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331,412,972	328,079,350	98,99%
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	49.999.800	47.530.000	95,06%
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	47.530.000	95,06%
i.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.800	47.530.000	95,06%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	49.999.800	47.851.500	95,70%
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.999.800	47.851.500	95,70%
i.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.999.800	47.851.500	95,70%
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	23.824.100	23.824.000	100%
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	14.700.000	14.700.000	100%
i.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.700.000	14.700.000	100%
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.999.100	6.999.000	100%
i.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.999.100	6.999.000	100%
3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	2.125.000	2.125.000	100%

i.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	2.125.000	2.125.000	100%
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.719.925.141	2.709.340.463	99,61%
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.719.925.141	2.709.340.463	99,61%
i.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.719.925.141	2.709.340.463	99,09%
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143.290.000	143.261.000	99,98%
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	143.290.000	143.261.000	99,98%
i.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36.990.000	36.990.000	100%
ii.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	106.300.000	106.271.000	99,97%
12	Program Pengembangan Ekspor	110.550.104	110.469.100	99,93%
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.550.104	110.469.100	99,93%
i.	Pameran Dagang Nasional	110.550.104	110.469.100	99,93%
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	49.999.734	49.758.000	99,52%
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan pengawasan	49.999.734	49.758.000	99,52%
i.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	49.999.734	49.758.000	99,52%
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	546.081.300	386.019.979	70,69%

1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	546.081.300	386.019.979	70,69%
i.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	491.709.800	340.193.479	69,19%
iv.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10.000.000	9.860.000	98,60%
v.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	44.371.500	35.966.500	81,06%
	JUMLAH	15.180.827.000	14.624.197.662	96,33%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.a Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal yang kritis terkait dengan pelayanan SKPD dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah proses manajemen mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus kita kelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu setiap tahapan tersebut harus bisa dikoordinasikan dan integrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

2.3.b Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun permasalahan atau hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan Isu-Isu penting dan strategis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo, antara lain :

A. Permasalahan

1. Terbatasnya alokasi anggaran Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo merupakan permasalahan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya karena masih banyaknya usulan masyarakat yang belum tercover, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan 3 urusan pilihan yaitu di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang paralel dengan tugas lembaga negara di 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Sehingga perlu dukungan dana yang memadai;
2. Pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran serta tolok ukur kinerja SKPD oleh aparatur Perangkat Daerah masih rendah, sehingga menyebabkan proses

perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang seringkali masih bisa;

3. Kesulitan akses mendapatkan permodalan tanpa/dengan bunga yang kecil ke lembaga keuangan untuk UKM dan IKM yang membutuhkan permodalan sebagai pengembangan usaha, sehingga perlu dibentuk adanya lembaga oleh Pemerintah Daerah semacam Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
4. Kondisi sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Ponorogo yang kurang layak sehingga perlu diadakan revitalisasi pasar;
5. Jumlah IKM di Kabupaten Ponorogo yang banyak dan berpotensi tetapi produk-produknya belum banyak dikenal oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat luar, sehingga perlu dibangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) sebagai tempat pengenalan produk IKM mulai dari proses produksi sampai dengan produk jadi.

B. Hambatan :

Hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kedepan dalam meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah; dan
3. Lemahnya dukungan permodalan bagi IKM dan UKM.

2.3.c Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Adanya hambatan atau isu-isu strategis tersebut diatas secara umum tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing SKPD dengan serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat implementasinya dimasyarakat telah terjadi sinergisitas antar sektor.

Aspek partisipasi masyarakat umumnya dalam menggerakkan roda ekonomi secara makro berjalan secara normatif dan sistematis, sehingga pemerintah hanya dominan bergerak pada posisi fasilitator dan regulator, dengan syarat aspek keamanan dan iklim kondusif menjamin aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2.3.d Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain membentuk koperasi menjadi koperasi yang tangguh, professional dan mandiri; memacu pertumbuhan wirausaha baru; revitalisasi sarana perdagangan dan penataan PKL yang ada di Kabupaten Ponorogo. Semua itu untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo **HEBAT** (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa).

2. Peluang

Adapun peluang yang potensial antara lain :

- a. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
- b. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
- c. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;
- d. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu;
- e. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;

2.3.e Formulasi Isu-isu Strategis

Formulasi isu-isu strategis berupa rekomendasi perumusan program dan kegiatan, antara lain :

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah;
2. Revitalisasi sarana perdagangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta memperkecil silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada azas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD antar SKPD dan antar



SKPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam dokumen Renja SKPD memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dokumen Renja SKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana terdapat pada tabel T-C.31.



Format C

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%	100.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. PO	Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%	100.000.000	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80%	100.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PO	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80%	100.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	100.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Kab. PO	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SDM Koperasi					dan Kompetensi SDM Koperasi					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	150.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	150.000.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase kemudahan perizinan usaha mikro	80%	150.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase kemudahan perizinan usaha mikro	80%	150.000.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	150.000.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	150.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan dan pendaftaran perusahaan	11,50%	112.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan dan pendaftaran perusahaan	11,50%	112.000.000,00	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	50%	100.000.000,00	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	50%	100.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	5.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	5.000.000,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	5.000.000,00	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	7.000.000,00	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	7.000.000,00	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	2.450.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	2.250.000.000,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	2.450.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	2.250.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	2.450.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	2.250.000.000,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22%	234.000.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22%	234.000.000,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar		Prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0,22%	234.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di		Prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0,22%	234.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar			Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	184.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	184.000.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	50.000.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	50.000.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	40.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	40.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	40.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	40.000.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	40.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	40.000.000,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	16,9%	151.000.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	16,9%	151.000.000,00	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50%	151.000.000,00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50%	151.000.000,00	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	151.000.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	151.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	2.464.893.842,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	2.314.893.842,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	2.464.893.842,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	2.314.893.842,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	6 Dokumen	210.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	6 Dokumen	160.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	39.999.700,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	39.999.700,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2.194.894.142,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2.094.894.142,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional	0,25%	135.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentase Penyampaian Data Industri	15 IKM	135.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	135.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	100.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	14.044.201.834,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	10.801.596.496,00	
			Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%				Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	58.605.282,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	40.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.999.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	28.605.482,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	8.857.771.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	8.996.986.561,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.627.772.200,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.786.986.961,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.200.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.800.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	14.999.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1 Laporan	14.999.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	80%	550.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	80%	1.00.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	550.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	554.321,975,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	552.321.975,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.924.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.924.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	255.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	245.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	140.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	140.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	80.397.975,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	80.397.975,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.015.287.960,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	995.287.960,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	953.287.960,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	953.287.960,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	80%	147.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	80%	147.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	147.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	147.000.000,00	

Tabel 4. Label T-C.31



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 didasarkan pada Reviu Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2026 disamping hasil survey kelengkapan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel T-C.32.

Format D

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
 Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,50%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ps. Legi 2. Ps. Legi Selatan 3. Ps. Sepeda 4. Ps. Pon 5. Ps. Tonatan 6. Ps. Pulung 7. Ps. Jenangan 8. Ps. Kesugihan 9. Ps. Sawoo I 10. Ps. Sawoo II 11. Ps. Tamansari 12. Ps. Tamansari Hewan 13. Ps. Jetis Umum 14. Ps. Jetis 15. Ps. Jetis Hewan 16. Ps. Balong 17. Ps. Bungkal 18. Ps. Bungkal Hewan 19. Ps. Slahung 20. Ps. Slahung Hewan 21. Ps. Ngumpul 22. Ps. Ngumpul Hewan 23. Ps. Somoroto (TP) 24. Ps. Somoroto 25. Ps. Somoroto I 26. Ps. Somoroto II Hewan 27. Ps. Badegan 28. Ps. Badegan Hewan 	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional	0,25%	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentase Penyampaian Data Industri	0,25%	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	80%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable	80%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	

Tabel 5. Label T-C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai visi “Menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius”. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Perangkat Daerah, serta perannya sebagai Dinas Teknis yang menangani Koperasi dan Usaha Mikro tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Ponorogo.

Tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan.

Diantara program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, ada program yang mendukung program prioritas nasional antara lain Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Nilai tambah sektor riil dan Industrialisasi dan kesempatan kerja. Program tersebut adalah

1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN,
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM),
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN dan,
4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mendasar pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**, selanjutnya Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata”**.

Tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing; dan
2. Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian sesuai Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industry pengolahan produk pertanian.
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat;

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis SKPD disamping juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian tahun 2026 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah:

1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran 2. Meningkatnya nilai perdagangan

Sasaran tersebut dicapai dengan 5 program, 7 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

c. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN kegiatan:

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, meliputi kegiatan:

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, meliputi kegiatan:

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sasaran 3. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo.

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program, 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sasaran 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tersebut di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 16.253.490.338,-. Sumber pendanaan berasal dari DAU sebesar Rp. 12.453.596.196,-, Pajak Rokok sebesar Rp. 2.250.000.000, dan DBHCHT sebesar Rp. 1.549.894.142,-. Adapun rincian program/kegiatan beserta pagu indikatifnya sebagaimana tertuang di dalam tabel T-C.33.

Format E

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		80%	0,00	Dana Alokasi Umum		80%	150.000.000,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya		100%	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi		27,50%	100.000.000	Dana Alokasi Umum		27,50%	300.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		80%	10.000.000	Dana Alokasi Umum		80%	150.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		250 Orang	100.000.000	Dana Alokasi Umum		250 Orang	300.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah		2,50%	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2,50%	200.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah		80%	150.000.000	Dana Alokasi Umum		80%	200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha	150.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Unit Usaha	200.000.000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan		11,50%	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum		11,50%	350.000.000,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan		50%	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		50%	150.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12 Dokumen	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase penerbitan tanda daftar gudang		50%	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		50%	50.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		12 Dokumen	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000,00
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		50%	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50%	50.000.000,00
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12 Dokumen	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		100%	2.700.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pajak Pokok		100%	2.100.000.000,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan		100%	2.250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pajak Pokok		100%	2.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		28 unit	2.250.000.000,00	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 unit	2.500.000.000,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting		0,22%	234.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,22%	400.000.000,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar		0,22%	234.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0,22%	400.000.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		12 Laporan	184.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	300.000.000,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen		10%	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10%	75.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan		100%	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	75.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		10000 UTTP	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10000 UTTP	75.000.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan		16,9%	151.000.000,00	Dana Alokasi Umum		16,9%	200.000.000,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		50%	151.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50%	200.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		20 UMKM	151.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20 UMKM	200.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN								
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri		100%	472.400.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	2.500.000.000,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		100%	472.400.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	2.500.000.000,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		6 Dokumen	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	250.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		6 Dokumen	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		6 Dokumen	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		6 Dokumen	39.999.700,00	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	75.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		6 Dokumen	2.094.894.142,00	DAU dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		6 Dokumen	2.500.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional		100%	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000,00
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		6 Dokumen	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)									
	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA					Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			
		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	10.134.6 80.517,0 0			100%	12.060.0 00.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu		100%	58.605.282,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	175.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	35.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	35.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100%	8.408.616.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	9.045.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 Orang/bu lan	7.786.986.961,00	Dana Alokasi Umum		74 Orang/bulan	8.000.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	1.150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	1.300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	14.999.800,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	14.999.800,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100%	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	350.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		74 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum		74 Orang	700.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai		100%	441.887.675,00	Dana Alokasi Umum		100%	915.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.924.200,00	Dana Alokasi Umum		4 Paket	35.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	235.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Paket	300.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	140.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30 Paket	150.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	80.397.975,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.074.571.560,00	Dana Alokasi Umum		100%	1.375.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.113.287.960,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.000.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	20.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel		100%	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	175.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		5 Unit	200.000.000,00

Tabel 6. Label T-C.33



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2026 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Pada tahun 2026 direncanakan ada 9 (Sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sasaran program/kegiatan 2026 ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana / pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel

**Tabel 7. Usulan Program/Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Ponorogo**

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80%	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	10%	2.17.0 5.2.01. 0001	Rp 250.000.00 0	Rp 250.000. 000	Dana Alokasi Umum	
				Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%		Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%					
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	2.17.0 7.2.01. 0004	Rp 175.000. 000	Rp 175.000. 000	Dana Alokasi Umum	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kepentingan										
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,50%	3.30.02.2.01.0001	Rp 10.000.000	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			3.30.02.2.02.01	Rp 5.000.000,		Dana Alokasi Umum	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Minuman	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual	12 Dokumen	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	50%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN			3.30.02.2.05.0001	Rp 7.000.000		Dana Alokasi Umum	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beralkohol Golongan B dan C	Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	n Minuman Berlakohol Golongan B dan C		PERUSAHAA N							
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 unit	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasrana perdaganga n	60%	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdaganga n	100 %	3.30.0 3.2.01. 0002	Rp 2.200.000. 000	Rp 2.200.00 0.000	Dana Alokasi Umum	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalia n harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22 %	3.30.0 4.2.02. 0002	Rp 234.000.00 0	Rp 284.000. 000	Dana Alokasi Umum	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting		3.30.0 4.2.02. 0003	Rp 50.000.000		Dana Alokasi Umum	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	3.30.0 6.2.01. 0001	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Dana Alokasi Umum	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50%	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100%	3.30.0 7.2.01. 0005	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Dana Alokasi Umum	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana	100%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengemban	100%	3.31.0 2.2.01. 0001	Rp 10.000.000	Rp 2.064.893.842	Dana Alokasi Umum)	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Industri Kabupaten			gan Industri		3.31.0 2.2.01. 0002	Rp. 10.000.000		Dana Alokasi Umum)	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						3.31.0 2.2.01. 0003	Rp 10.000.000		Dana Alokasi Umum	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						3.31.0 2.2.01. 0004	Rp 39.999.700		Dana Alokasi Umum	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						3.31.0 2.2.01. 0005	Rp 1.994.894. 142		DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyampaian Data Industri	15 IKM	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional	0,25 %	3.31.04.2.01.0003	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	Dana Alokasi Umum)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100 %	2.17.01.2.01.0001	Rp 29.999.800	Rp10.159.680.517	Dana Alokasi Umum)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan							2.17.01.2.01.0006	Rp 28.605.482		Dana Alokasi Umum)	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%				2.17.0 1.2.02. 0001	Rp. 7.627.772. 200		Dana Alokasi Umum)	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen							2.17.0 1.2.02. 0002	Rp 1.200.000. 000		Dana Alokasi Umum)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							2.17.0 1.2.02. 0005	Rp 14.999.800		Dana Alokasi Umum)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan							2.17.0 1.2.02. 0007	Rp 14.999.800		Dana Alokasi Umum)	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	80%				2.17.0 1.2.05. 0009	Rp 550.000.00 0		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket							2.17.0 1.2.06. 0002	Rp 24.924.000		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai			Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat		2.17.0 1.2.06. 0004	Rp 255.000.00 0		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket						100 %	2.17.0 1.2.06. 0005	Rp 140.000.00 0		Dana Alokasi Umum	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					daerah secara partisipasif dan tepat waktu		2.17.0 1.2.06. 0006	Rp 32.000.000		Dana Alokasi Umum	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan							2.17.0 1.2.06. 0009	Rp 102.397.97 5		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				2.17.0 1.2.08. 0002	Rp 973.287.96 0		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan							2.17.0 1.2.08. 0003	Rp 30.000.000		Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan							2.17.0 1.2.08. 0004	Rp 12.000.000		Dana Alokasi Umum	

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAR GET	KODE	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
										APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable	80%				2.17.0 1.2.09. 0002	Rp 150.000.00 0		Dana Alokasi Umum	

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Renja SKPD tahun 2026 merupakan penjabaran Reviu Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Untuk memastikan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, perlu dirumuskan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pada implementasinya Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2026-2029 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2026-2029;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo akan benar-benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2026 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2026 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;
3. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;

4. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses pelaksanaannya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 20226;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Renja SKPD Tahun 2026, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih terintegrasi



2026

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA (RENCANA KERJA)

perdagkum.ponorogo.go.id

perdagkum.png

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, proses pembangunan memerlukan peran serta seluruh masyarakat, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik di masa datang, serta mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius sehingga menjadikan Kabupaten Ponorogo meningkat tingkat kesejahteraannya.

Ponorogo, Agustus 2025

Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo



RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197512091996031001